

# Target Investasi Rp 1.200 T Disebar ke 6 Wilayah

Oleh **Triyan Pangastuti**

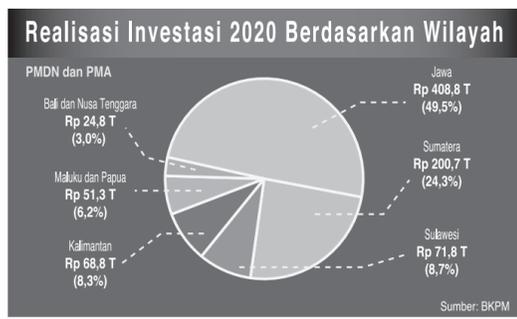
JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menyebar target investasi 2022 sebesar Rp 1.200 triliun —naik 33,3% dari target tahun ini yang sebesar Rp 900 triliun— ke enam wilayah yang telah dipetakan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke luar Jawa.

“Kebutuhan realisasi investasi 2022 tantangannya luar biasa, Rp 1.200 triliun. Kami sudah membagi target realisasi investasi per wilayah,” ujar Deputy Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soeji pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk Percepatan Investasi yang diselenggarakan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) pada Sabtu (19/6).

Imam merinci, realisasi investasi wilayah Sumatera pada 2022 ditargetkan Rp 222,73 triliun, Kalimantan Rp 82,79 triliun, dan Sulawesi Rp 81,25 triliun. Sedangkan porsi realisasi investasi di wilayah Jawa ditargetkan Rp 475 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp 41,26 triliun, serta terakhir Maluku dan Papua Rp 65,27 triliun.

Sedangkan realisasi investasi 2020 berdasarkan wilayah secara rinci tercatat, Jawa Rp 408,8 triliun (49,5% dari total Rp 826,3 triliun), Sumatera Rp 200,7 triliun (24,3%), Sulawesi Rp 71,8

triliun (8,7%), Kalimantan Rp 68,8 triliun (8,3%), Maluku dan Papua Rp 51,3 triliun (6,2%), serta Bali dan Nusa Tenggara Rp 24,8 triliun (3%). Investasi ini meliputi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Ia mengatakan, target realisasi investasi tahun depan tersebut akan dikejar baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). “Kami



juga akan meminta BUMN (badan usaha milik negara) untuk ikut segera merealisasikan investasinya,” ucap dia.

Menurut Imam, ada empat hal kunci untuk mendorong pencapaian target investasi. Pertama, penyebaran investasi yang merata di berbagai daerah. Kedua, investasi yang berkualitas. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan terakhir terkait pemerataan pendapatan.

Lebih lanjut, Imam tak menampik bahwa hingga saat ini masih ada permasalahan investasi yang terjadi. Pertama, terkait dengan rencana tata ruang, pembebasan lahan, status dan kepemilikan lahan, tumpang tindih kepemilikan konsesi, regulasi dan perpajakan, perizinan amdal, izin lingkungan IPPKH, seret kepastian jangka waktu. Kemudian masalah perjanjian kerja sama, ketenagakerjaan, dan perpajakan.

“Namanya tumpang tindih kepemilikan konsesi, sudah di tumpang di tindh konsensinya. Bahaya sekali itu. Sudah masuk ini barang, tapi di tumpang dengan konsesi yang lain,” kata dia.



## Peluncuran Produk

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki foto bersama *Founder* sekaligus CEO IDCloudHost Alfian Pamungkas Sakawiguna (tengah), CMO IDCloudHost Muhammad Mufid Luthfi (kanan atas), dan CTO IDCloudHost Faisal Reza (kanan bawah) dalam peluncuran dua produk terbaru IDCloudHost, Server Cloud VPS (Virtual Private Server) dan Object Storage, secara daring, Rabu(16/6). Kehadiran dua produk ini diharapkan akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam mengembangkan bisnisnya, terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), web developer hingga perusahaan rintisan (*start-up*).

Ia menceritakan, awal mula tumpang tindih terjadi yakni ketika izin usaha pertambangan (IUP) sudah dikeluarkan oleh bupati, kemudian bupati tidak terpilih lagi, dan datang bupati baru sehingga terdapat evaluasi dan datang perusahaan baru sehingga izin kembali dibuat. Kementerian Investasi mendukung, tumpang tindih konsesi lahan dan tumpang tindih IUP mencapai ratusan hingga ribuan. “Kami mensinyalir terkadang satu izin usaha pertambangan (IUP), dimiliki 3 IUP yang sama-sama yang memiliki kegalan, memiliki dokumen,” tutur dia.

## Luar Jawa

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, esensi dari pertumbuhan ekonomi nasional, tak hanya bertumpu pada pertumbuhan yang tinggi, namun harus terjadi pemerataan ekonomi antara daerah Jawa dan Luar Jawa.

Ada faktor yang menyebabkan investor saat ini juga memperhatikan luar Jawa sebagai tempat investasi, karena efek positif dari pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir saat periode pemerintahan Jokowi-

## Jusuf Kalla

“Nggak bisa dipungkiri pembangunan infrastruktur lima tahun kemarin di bawah pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, itu telah mampu menembus ruang-ruang yang selama ini selalu dianggap sebagai *handicap* oleh para investor untuk melakukan investasinya dan sekarang terjadi di luar pulau Jawa,” papar dia. Apalagi, saat ini masa depan pemerataan pertumbuhan ekonomi sudah mulai terjadi, yakni investasi sudah tak mengacau hanya di Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa. Dalam konteks investasi, lan-

jut Bahlil, investasi langsung asing (*foreign direct investment/ FDI*) di masa pandemi tidak mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu menunjukkan bahwa investor dunia masih percaya dengan Indonesia.

“Kemudian *foreign direct investment* tidak pernah juga dalam sejarah pascareformasi PMDN lebih besar dari PMA, padahal pandemi Covid-19 pada 2020. Di hampir semua negara, FDI itu turun 30-40%, di Indonesia turunnya tidak lebih dari 10%. Ini mencerminkan *trust global* terhadap negara kita itu semakin baik,” pungkask dia.

## Pabrik Baterai LG di Karawang Siap Groundbreaking Akhir Juli

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, pemasangan tiang pancang (*groundbreaking*) pabrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG asal Korea Selatan (Korsel) di Kota Deltamas, Karawang, Jawa Barat, akan dilakukan pada akhir Juli 2021. Pelaksanaan *groundbreaking* ini lebih cepat dari perkiraan sebelumnya yaitu pada September tahun ini.

Bahlil mengatakan, tahap ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan *head of agreements* (HoA) atau kesepakatan pokok proyek investasi baterai terintegrasi antara PT Industri Baterai Indonesia dengan Konsorsium LG pada 29 April silam. “Ini, untuk LG, mulai *groundbreaking* akhir Juli ini, paling lambat Agustus awal. Kami sudah bangun, jadi bukan cerita dongeng-dongeng ini,” ujar Bahlil dalam Rakornas Hipmi, Sabtu (19/6).

Adapun pembangunan tahap pertama ini rencananya akan memiliki kapasitas produksi baterai mencapai 10 *gigawatt hour* (GWh), yang nantinya akan digunakan untuk kendaraan listrik produksi Hyundai.

Ia mengatakan, investasi strategis di industri sel baterai kendaraan listrik ini merupakan yang pertama dilakukan sepanjang sejarah Republik Indonesia. “Kita sudah membangun kerja sama dengan LG US\$ 9,8 bil-

lion atau senilai Rp 142 triliun. Ini investasi terbesar pascareformasi,” tutur dia.

Bahlil, berharap pengusaha nasional yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) nikel di daerah dapat mulai berkolaborasi dengan investor luar negeri yang masuk ke Indonesia ataupun investor dalam negeri.

Menurut Bahlil, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja akan mampu menjadi penggerak masuknya investasi ke Indonesia. “Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, maka seluruh perizinan sekarang satu pintu, di daerah tidak perlu ke bupati atau gubernur tapi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kementerian Investasi. Jadi, dia yang teken atas nama Bupati dan gubernur,” ungkap dia.

Dalam catatan Bahlil, selain LG, sudah ada rencana investasi dari Contemporary Amperex Technology Co (CATL) untuk pembangunan industri baterai terintegrasi dengan nilai investasi US\$ 5,2 miliar, kemudian BASF produsen prekursor dan katoda serta terakhir Tesla yang akan membangun industri baterai untuk penyimpanan energi.

Pada kesempatan itu Bahlil juga mengatakan, dirinya sudah merealisasikan investasi mangkrak hingga senilai Rp 517,6 triliun pada kuartal I-2021. Adapun secara keseluruhan, total investasi mangkrak yang perlu ditangani BKPM senilai Rp 708 triliun.

“Investasi mangkrak ketika saya masuk di BKPM Rp 708 triliun. Kenapa investasi mangkrak ini telah terjadi sejak empat hingga enam tahun tidak pernah dieksekusi karena terjadi konflik persoalan yang sangat luar biasa. Ego sektoral kementerian dan lembaga, aturan tumpang tindih kabupaten, kota provinsi dan satu lagi persoalan pemain-pemain yang tidak dapat dipegang tapi dapat dirasakan, masalah tanah dan segala macam,” pungkask dia.

## Lebih Baik

Terkait kondisi ekonomi makro, Bahlil mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi pada 2020 yang tercatat kontraksi 2,19%, masih jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat dua tertinggi di antara negara G20. Hal ini didukung oleh fondasi ekonomi nasional yang semakin baik.

“Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, kita masih jauh lebih baik dan kita masuk dalam GDP terbesar nomor dua untuk G20 setelah Tiongkok,” ucap dia. Ia tak menampik bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu menekan kinerja ekonomi di berbagai negara belahan dunia dan hanya sedikit negara yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi masuk zona positif di kawasan Asean seperti Vietnam. (try)

## 61,4 JUTA UMKM BELUM TERFASILITASI PERIZINAN OSS Versi Baru Dipastikan Siap Beroperasi 2 Juli 2021

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, perizinan berusaha satu pintu melalui Online Single Submission (OSS) versi baru yang berbasis risiko siap diluncurkan pada 2 Juli 2021 mendatang. Nantinya, seluruh perizinan terkait investasi cukup dilakukan secara *online* dalam satu sistem tersebut.

“Pada 2 Juli (OSS versi baru) kita *go live*, tidak ada lagi izin-izin yang kita proses manual,” ujar Bahlil saat berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk Percepatan Investasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) pada Sabtu (19/6).

Dengan adanya OSS berbasis risiko, nantinya pengusaha tak perlu lagi repot untuk mengurus izin ke pemerintah daerah. Sebab, Kementerian Investasi yang akan mengeluarkan izin atas nama bupati atau gubernur di daerah tersebut. “Izin daerah *enggak* perlu ke bupati/gubernur lagi, tapi ke dinasnya Kementerian Investasi. Nanti, dia teken atas nama bupati/gubernur tersebut,” jelas dia.

Tak hanya berlaku terkait perizinan di daerah, OSS versi baru juga berlaku untuk izin kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Bahlil mencontohkan, izin jasa keamanan di Polri juga akan diurus Kementerian Investasi/BKPM.

Dia berharap, kemudahan pengurusan izin itu bisa mempercepat masuknya investasi ke Indonesia, sehingga perekonomian nasional juga bisa segera pulih. “Izin-izin pusat juga, izin Polisi untuk jasa keamanan, itu juga ke BKPM. Ini semua dalam rangka percepatan proses



Bahlil Lahadalia

pelayanan, pejabat penghubung ada semua di sana,” tambah dia.

Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui satu pintu, yakni OSS.

Oleh karena itu, pihak yang berwenang mengeluarkan perizinan usaha melalui OSS yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPSTP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kepala badan usaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

## Gap Perizinan UMKM

Pada kesempatan yang sama, Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot mengaku, hingga saat ini masih ada tantangan dalam pendataan

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini, data yang sering mengemuka adalah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64 juta.

Yuliot mengatakan, potret perizinan berusaha pelaku UMKM yang telah difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem OSS versi lama sejak diluncurkan 8 Juni 2018 hingga 30 April 2021, tercatat sudah diterbitkan 3,3 juta nomor izin berusaha (NIB) dengan total NIB untuk UMKM mencapai 2,66 juta.

“Nilah potret perizinan berusaha di Kementerian Investasi. Bila dilihat ada *gap* dengan datanya UMKM 64 juta. Ini berarti kami harus kerja keras untuk membuat legalitas bagi pelaku UMKM sekitar 61,4 juta. Pekerjaan yang cukup berat bagi kami untuk memfasilitasi perizinan,” tutur dia.

Secara rinci, data perizinan berusaha melalui OSS yang telah diterbitkan Kementerian Investasi/BKPM yakni UMK mencapai 2,2 juta NIB atau 67% dari total keseluruhan UMKM. Kemudian usaha besar sebesar 619.740 NIB atau mencapai 19%, dan terakhir pelaku UMKM menengah 14% atau 479.350 NIB.

Yuliot mengaku, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memastikan data secara lengkap untuk 64 juta pelaku UMKM terkait jenis usaha dan sebaran wilayahnya.

Ini sangat diperlukan mengingat UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian nasional dan memiliki kontribusi hampir 60% produk domestik bruto (PDB). “Biasanya, UMKM dalam melaksanakan kegiatan usaha sifatnya informal,” pungkask dia. (try)

## Kemenkeu: Realisasi Lelang Barang Tegahan Capai 46,6%

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, realisasi lelang oleh negara terhadap barang tegahan atau sitaan hingga Jumat (18/6) mencapai Rp 13,5 triliun atau 46,6% dari target lelang 2021 yang sebesar Rp 29 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu hingga Juni 2020 yang sebesar Rp 10,91 triliun.

“Sudah hampir 50% dari target, masih ada waktu sampai akhir Juni untuk semester I. Saya harap nanti sudah di atas 50% pada semester pertama ini,” ucap Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Joko Prihanto dalam media *briefing* pada Jumat (18/6).

Joko mengungkapkan, lelang tersebut dilakukan terhadap barang tegahan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Kejaksaan Agung seperti pabrik, hotel, dan mobil antik. Kemenkeu menugaskan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pelaksana lelang.

Beberapa contoh lelang dengan nilai tinggi yaitu pada 16 Februari 2021 KPKNL Jakarta II berhasil melelang mobil Dodge Charger dengan limit Rp 99,47 juta dan terjual

Rp 1,58 miliar. Berikutnya pada 3 Juni 2021, KPKNL Jakarta II berhasil melelang mobil Mini Cooper 40 beserta otomotif parts-nya laku terjual Rp 623,57 miliar dari limit yang ditetapkan Rp 48,57 juta.

Selanjutnya, pada 17 Juni 2021, KPKNL Jakarta II melaksanakan lelang tegahan DJBC berupa mobil Mercedes Benz E270 CDI, Ferules, Hydraulic Adaptor, dan Hose Fitting dengan limit Rp 40,87 juta dan laku Rp 634,87 juta. Selain itu, masih ada lelang barang dalam bentuk properti seperti bangunan pabrik dan hotel.

“Untuk tahun 2021, bangunan pabrik ini ada di Bogor, Jawa Barat dengan nilai Rp 300 miliar. Nanti di Pekalongan juga ada (barang lelang) pabrik dengan limit Rp 500 miliar, mudah-mudahan laku dalam waktu dekat. Biasanya yang mahal adalah pabrik, hotel, serta properti besar,” ucap Joko.

Sementara itu, Direktur Kepabeanan Internasional DJBC Kemenkeu Syarif Hidayat mengatakan, barang tegahan DJBC yang dapat dilelang yakni barang-barang yang belum atau tidak memenuhi prosedur kepabeanan. Barang-barang dimaksud terdiri atas tiga kriteria yaitu barang

yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMN).

Adapun BMN meliputi BTD dibatasi tidak diselesaikan dalam 60 hari sejak disimpan pada tempat penimbunan pabean (TPP), BTD dilarang ekspor/impor, dan BDN barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean yang pemilikinya tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam 30 hari sejak disimpan di TPP.

Selain itu, BDN yang dilarang atau terbatas untuk diimpor/dieksport, BDN barang atau sarana pengangkut ditegah dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal, dan barang pengangkut diputus hakim yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Namun, kata Syarif, dalam pelaksanaan pihaknya juga melihat kondisi di lapangan. Ada barang yang diputuskan tidak dilelang tapi dihibahkan, misalnya barang tegahan komputer dihibahkan ke sekolah yang membutuhkan. “Jadi, kami melihat kondisi kebutuhan yang ada dan pertimbangan pimpinan,” pungkask dia. (ark)

**CIMBNIAGA**

**PEMBERITAHUAN**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 (selanjutnya disebut Sukuk Mudharabah) bahwa sesuai Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ke-8 periode : 27 Maret 2021 s/d 27 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

No	PARAMETER	JUMLAH	
		SERI B	SERI C
1	Portofolio Pembiayaan dengan Akad <i>Musyarabah Mutanajisah</i> (MMQ)	22.597.239.000,000	
2	Pendapatan Pembiayaan dari Akad MMQ	139.361.000,000	
3	Nilai Sukuk Mudharabah	287.000.000,000	391.000.000,000
4	Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	17,50%	18,13%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah + Insestif	5.022.500,000	7.086.875,000
6	Tingkat Bagi Hasil Setara (g.a)	7,00%	7,25%

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran pendapatan bagi hasil ke-5 Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 27 Juni 2021.

Jakarta, 21 Juni 2021

EMITEN: **CIMBNIAGA** PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
WALI AMANAT: **PermatBank** PT BANK PERMATA Tbk

**PT COLORPAK INDONESIA Tbk**  
 (“Perseroan”)  
 Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini dimumkan kepada Para Pemegang Saham PT COLORPAK INDONESIA Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) keduanya disebut “Rapat” pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2021.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman dan mata acara Rapat akan dimumkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sampai pukul 16:00 WIB atau pemilik rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASYKSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yakni harus sudah ditanda oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pengumuman Rapat.

Jakarta, 21 Juni 2021  
PT COLORPAK INDONESIA Tbk  
DIREKSI